

PEKERJA MIGRAN INDONESIA - PELINDUNGAN

2022

PERDAPROV. JATIM NO.2, LD 2022/NO. 2 SERI D, TLD NO. 107, 43 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK : Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berhak atas jaminan perlindungan dari negara untuk memperoleh keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum dan setelah bekerja sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 10 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 59 Tahun 2021; PERPRES No. 90 Tahun 2019; PERDAPROV JATIM No. 16 Tahun 2012; PERDAPROV JATIM No. 2 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, kelembagaan pelayanan Pekerja Migran Indonesia, pendirian Kantor Cabang P3MI, pelindungan hukum, sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Sosial, sistem informasi, koordinasi dan kerja sama, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana serta pembiayaan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2022.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 11 hlm